



DIALEKTIKA MAKNA BELA NEGARA DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA: ANALISIS SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Leonardo Mukti Nugroho^{1*}

¹Magister Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 June 2026

Accepted 11 September 2026

Available online 30 October 2026

Kata Kunci:

Bela Negara; ASN;
Birokrasi, Nasionalisme;
Systematic Literature
Review

Keywords:

State Defense; Civil
Servants; Bureaucracy,
Nationalism; Systematic
Literature Review

ABSTRAK

Bela negara merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan membangun loyalitas warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus representasi negara dalam pelayanan kepada masyarakat. Meskipun berbagai program internalisasi nilai bela negara telah diintegrasikan ke dalam sistem pembinaan ASN, sebagian besar penelitian masih memandang bela negara sebagai konsep normatif yang berorientasi pada efektivitas program. Kajian mengenai pemaknaan subyektif bela negara di kalangan ASN masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika pemaknaan bela negara di kalangan ASN melalui pendekatan Systematic Literature Review. Sebanyak 20 artikel nasional dan internasional dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola penelitian, tema dominan, dan kesenjangan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bela negara tidak dapat dipahami sebagai konsep tunggal dan final, melainkan sebagai arena

dialektika yang melibatkan proses konstruksi, internalisasi, negosiasi, kontestasi, dan resistensi makna. Negara membentuk makna dominan melalui regulasi, pelatihan, dan budaya organisasi birokrasi, sementara ASN secara aktif menginterpretasikan nilai-nilai tersebut berdasarkan pengalaman kerja, posisi struktural, generasi, dan konteks organisasi. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian terkait minimnya kajian mengenai pemaknaan subyektif bela negara serta berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi birokrasi dengan menempatkan ASN sebagai subyek aktif dalam produksi makna bela negara.

ABSTRACT

State defense is a strategic instrument for strengthening national resilience and fostering citizens' loyalty to the Unitary State of the Republic of Indonesia. Within the bureaucratic context, Civil Servants play a crucial role as public policy implementers and state representatives in delivering public services. Although state defense values have been integrated into ASN development programs, most previous studies have approached state defense as a normative concept focused on program effectiveness. Research on how civil servants subjectively interpret state defense remains limited. This study analyzes the dialectics of state defense meaning-making among ASN using Systematic Literature Review approach. Twenty national and international scholarly articles were systematically reviewed to identify research patterns, dominant themes, and research gaps. The findings reveal that state defense is not a singular or fixed concept but a dialectical arena involving processes of construction, internalization, negotiation, contestation, and resistance of meaning. While the state promotes dominant meanings through regulations, training, and bureaucratic culture, civil servants actively reinterpret these values based on their experiences, structural positions, generational backgrounds, and organizational contexts. This study identifies a significant gap in the literature regarding subjective interpretations of state defense and contributes to the sociology of bureaucracy by positioning civil servants as active agents in meaning production.

* Corresponding author.

E-mail addresses: leonardo.nugroho@mhs.unsoed.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Pada Abad ke-21, perubahan lingkungan strategis telah membawa konsekuensi signifikan terhadap cara negara memaknai konsep pertahanan dan keamanan nasional. Pada saat ini, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk agresi militer konvensional, tetapi juga berkembang dalam bentuk ancaman multidimensional seperti radikalisme, terorisme, disinformasi digital, polarisasi sosial, serangan siber, krisis ekonomi, hingga degradasi identitas kebangsaan akibat globalisasi. Dalam situasi tersebut, konsep bela negara mengalami perluasan makna dari yang semula berorientasi pada pertahanan militer menjadi mencakup partisipasi seluruh komponen bangsa dalam menjaga eksistensi negara melalui berbagai bidang kehidupan.

Di Indonesia, konsep bela negara diatur melalui Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menempatkan bela negara sebagai hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara. Dalam perkembangannya, konsep bela negara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kesiapan menghadapi ancaman militer semata, melainkan juga sebagai upaya menumbuhkan nasionalisme, loyalitas terhadap negara, disiplin, serta pengabdian kepada kepentingan publik.

Salah satu kelompok yang punya peran strategis dalam implementasi nilai-nilai bela negara adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan profesi yang bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi tersebut menjadikan ASN tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai wajah negara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberhasilan internalisasi nilai bela negara pada ASN akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan nasional.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam berbagai program pengembangan ASN. Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta berbagai kegiatan penguatan wawasan kebangsaan merupakan instrumen yang digunakan untuk membentuk ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan loyal terhadap negara. Melalui program-program tersebut, negara berupaya membangun pemahaman kolektif mengenai arti penting bela negara sebagai bagian dari identitas profesional ASN.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bela negara memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan nasionalisme, disiplin, dan kinerja ASN. Adia (2022) menemukan bahwa pelatihan kesiapsiagaan bela negara mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan kepatuhan ASN terhadap organisasi. Pawirosumarto dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa pelatihan bela negara berkontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja dan kinerja aparatur. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa negara secara aktif membentuk karakter aparatur melalui berbagai instrumen pendidikan dan pelatihan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan ASN sebatas obyek kebijakan. Fokus penelitian lebih banyak diarahkan pada pengukuran efektivitas program, tingkat partisipasi, atau dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi. Akibatnya, dimensi subyektif tentang bagaimana ASN memahami, menafsirkan, dan memaknai bela negara dalam kehidupan birokrasi sehari-hari belum banyak mendapat perhatian. Padahal dalam perspektif sosiologi interpretatif, makna tidak pernah hadir secara obyektif dan tunggal. Makna merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, pengalaman, dan relasi kekuasaan yang berlangsung dalam kehidupan sosial. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, makna bela negara yang diproduksi oleh

negara melalui kebijakan dan pelatihan tidak serta-merta diterima secara identik oleh seluruh ASN. Setiap individu memiliki kemungkinan untuk menafsirkan ulang makna tersebut berdasarkan pengalaman sosial, posisi organisasi, latar belakang pendidikan, maupun budaya kerja yang mereka hadapi.

Selain itu, birokrasi modern merupakan arena sosial yang kompleks dan dipenuhi berbagai relasi kekuasaan. Foucault (1980) menjelaskan bahwa institusi modern bekerja melalui mekanisme disiplin yang membentuk subyek-subyek yang patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, bela negara dapat dipahami sebagai bagian dari diskursus yang diproduksi negara untuk membentuk ASN yang loyal, disiplin, dan sesuai dengan standar birokrasi. Namun sebagaimana ditegaskan Foucault, setiap relasi kekuasaan selalu membuka ruang resistensi. Artinya, ASN tidak selalu menerima makna dominan yang diproduksi negara secara pasif, melainkan dapat melakukan negosiasi, reinterpretasi, bahkan penolakan terhadap makna tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, pertanyaan penelitian dalam systematic literature review ini adalah: Bagaimana dialektika pemaknaan bela negara di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbentuk melalui proses konstruksi, obyektivasi, internalisasi, kontestasi, negosiasi, dan resistensi dalam praktik birokrasi? Pertanyaan ini menjadi fokus sintesis, sedangkan konteks Kementerian/Lembaga dengan karakteristik pegawai yang heterogen ditempatkan sebagai agenda studi empiris lanjutan.

Kontribusi artikel ini tidak terletak pada penambahan bukti empiris baru mengenai ASN, karena desainnya merupakan kajian literatur, melainkan pada sintesis konseptual yang mempertemukan empat lapis temuan literatur—nilai normatif, institusionalisasi kebijakan, praktik birokrasi, dan dinamika kritis—ke dalam satu kerangka dialektika makna. Kerangka tersebut menghubungkan proses konstruksi, obyektivasi, dan internalisasi sebagaimana dijelaskan Berger dan Luckmann dengan relasi kuasa, normalisasi, dan resistensi dalam perspektif Foucault, serta membaca birokrasi sebagai arena kontestasi melalui konsep hegemoni Gramsci dan arena-habitus Bourdieu. Dengan demikian, kebaruan artikel terletak pada perumusan model analitis yang menempatkan ASN bukan semata sebagai penerima nilai bela negara, tetapi sebagai agen yang dapat mereproduksi, menegosiasikan, mereinterpretasi, atau meresistensi makna dominan dalam praktik birokrasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif-interpretatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu mengenai bela negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrasi, nasionalisme, dan kebijakan pertahanan. SLR dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menemukan pola tematik, kecenderungan kajian, kesenjangan penelitian, serta membangun sintesis konseptual tentang bagaimana makna bela negara diproduksi dan dipertarungkan dalam ruang birokrasi.

Proses penelitian memanfaatkan alur kerja digital yang terdiri atas empat tahap yang saling melengkapi. Pertama, Publish or Perish digunakan untuk melakukan penelusuran literatur melalui Google Scholar. Google Scholar dipilih sebagai sumber pencarian karena penelusuran melalui basis data Scopus pada tahap awal menghasilkan data yang sangat terbatas. Kedua, Mendeley digunakan untuk mengelola hasil penelusuran, metadata artikel, penyimpanan dokumen, dan penataan referensi. Ketiga, VOSviewer digunakan untuk memetakan keterhubungan kata kunci dan perkembangan tema. Keempat, NotebookLM digunakan sebagai alat bantu membaca, mengorganisasi pertanyaan analitis, dan mengeksplorasi sintesis dari dokumen yang telah dikumpulkan. Seluruh hasil bantuan aplikasi tetap diverifikasi dan ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan artikel sumber.

Penelusuran mencakup publikasi tahun 2018–2025. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah dalam rentang 2018–2025; (2) artikel membahas bela negara/state defense atau konsep yang berhubungan langsung dengan nasionalisme, pertahanan nonmiliter, kebijakan bela negara, atau praktik ASN. Adapun Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "Bela Negara", "State Defense", "Aparatur Sipil Negara", "ASN", dan "Makna Bela Negara"; (3) artikel

menyediakan informasi tujuan, metode atau basis argumentasi, fokus kajian, dan temuan yang dapat diekstraksi; dan (4) artikel memiliki relevansi substantif dengan pertanyaan penelitian. Kriteria eksklusi meliputi publikasi di luar rentang waktu, dokumen nonilmiah tanpa basis analisis yang memadai, serta artikel yang tidak memiliki keterkaitan substantif dengan bela negara dan aparaturnya atau kelembagaan negara.

Data yang diperoleh kemudian diekstraksi ke dalam matriks penelitian yang memuat judul/nama publikasi, penulis, tahun, tujuan penelitian, metode, fokus kajian, dan temuan utama. Setiap artikel dibaca untuk mengidentifikasi posisi bela negara sebagai nilai normatif, kebijakan atau instrumentasi negara, praktik birokrasi, dan dinamika kritis. Hasil ekstraksi selanjutnya dibandingkan antarpublikasi untuk menemukan pola yang berulang maupun kontradiktif. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada deskripsi artikel, tetapi bergerak menuju sintesis tematik dan interpretasi sosiologis.

Penggunaan aplikasi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai pengganti penalaran ilmiah. Publish or Perish berfungsi pada tahap discovery, Mendeley pada tahap pengelolaan dan penataan sumber, VOSviewer pada tahap pemetaan struktur literatur, sedangkan NotebookLM pada tahap eksplorasi dan pengorganisasian sintesis. Pembagian fungsi tersebut membantu menjaga keterlacakan proses penelitian sekaligus membedakan antara hasil komputasional, bantuan pengorganisasian, dan interpretasi substantif peneliti. Pada akhirnya sebanyak 20 artikel ditetapkan sebagai korpus akhir dan dianalisis secara kualitatif-sintetis.

Tabel 1. Matriks Jurnal yang diteliti

No	Nama Jurnal/Tahun	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Fokus Kajian	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Pelatihan Materi Kesiapsiagaan Bela Negara (2022)	Viera Restuani Adia	Mengukur efektivitas pelatihan bela negara pada CPNS	Kuantitatif deskriptif, survei	Pelatihan bela negara ASN	Pelatihan efektif meningkatkan nasionalisme dan disiplin ASN
2	Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara (2021)	Danang Prasetyo dkk	Mengkaji hubungan hak dan kewajiban bela negara	Kualitatif, studi pustaka	Konsep normatif bela negara	Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara
3	Bela Negara Sebagai Implementasi Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda (2024)	Mas Fierna Janvierna Lusie Putria dkk	Menganalisis kesadaran bela negara generasi muda	Kualitatif, studi pustaka	Nasionalisme generasi muda	Nilai Pancasila meningkatkan kesadaran bela negara mahasiswa
4	Urgensi Kebijakan Rekrutmen ASN dalam Komponen Cadangan (2022)	Fauzan Hidayat	Menganalisis urgensi ASN dalam Komcad	Kualitatif deskriptif	ASN dalam Komcad	Rekrutmen ASN dinilai kurang relevan karena ASN sudah dibekali bela negara
5	Tingkat Partisipasi ASN Sebagai Komponen Cadangan (2022)	Prita Nur Wahyu dkk	Mengukur partisipasi ASN dalam Komcad	Kualitatif deskriptif	Partisipasi ASN	Partisipasi ASN sangat rendah akibat kurang sosialisasi
6	Merevitalisasi Spirit Pengabdian (2025)	Sukoco Henry Saputro dkk	Merumuskan strategi komunikasi bela negara ASN	Literature review	Komunikasi bela negara ASN	Komunikasi dialogis lebih efektif dibanding pendekatan dogmatis
7	Peran Serta PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan (2022)	Dodi Nopriza dkk	Menganalisis peran PNS Kemhan dalam Komcad	Kualitatif studi kasus	ASN dan pertahanan	PNS Kemhan strategis mendukung

No	Nama Jurnal/Tahun	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Fokus Kajian	Hasil Penelitian
						pertahanan negara
8	Menangkal Gerakan Radikalisme di Kalangan ASN (2021)	Rachmat Bahmim Safiri	Mengkaji radikalisme ASN dan strategi penanggulangannya	Kualitatif deskriptif	Radikalisme ASN	Nilai bela negara efektif menangkal radikalisme ASN
9	Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Perspektif Kesadaran Bela Negara (2023)	Siti Emira Khodati dkk	Mengkaji aktualisasi nilai Pancasila pada Society 5.0	Deskriptif kualitatif	Society 5.0 dan nasionalisme	Nilai Pancasila memperkuat kesadaran bela negara generasi digital
10	Integrasi Nilai Pancasila dan Sosiologi Birokrasi (2024)	Raudhina Oktia Ayu	Mengkaji ASN sebagai pertahanan non-militer	Kualitatif sosio-yuridis	ASN sebagai pertahanan non-militer	ASN berperan sebagai agen pertahanan non-militer
11	Kepemimpinan Strategis Kepala Daerah dalam Aktualisasi Bela Negara (2022)	Ria Purwati dkk	Mengkaji strategi kepala daerah dalam bela negara	Kualitatif studi literatur	Kepemimpinan dan bela negara	Kepemimpinan strategis menentukan keberhasilan bela negara
12	Membangun Sikap Bela Negara dengan Nilai Pancasila (2022)	Rini Novita Kristiani	Mengkaji implementasi nilai Pancasila dalam masyarakat	Kualitatif studi pustaka	Internalisasi Pancasila	Internalisasi Pancasila penting menghadapi globalisasi
13	Implementasi Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan (2023)	Lamidi	Mengkaji implementasi bela negara di wilayah perbatasan	Kualitatif post-positivisme	Kebijakan bela negara	Keberhasilan bela negara dipengaruhi kesejahteraan masyarakat
14	Pengaruh Pancasila dan Bela Negara di Era Pandemi (2022)	Salsabila Assani	Mengkaji perilaku bela negara di era pandemi	Kuantitatif survei	Bela negara era pandemi	Bela negara diwujudkan melalui dukungan produk lokal
15	Pentingnya Pendidikan Bela Negara untuk Nasionalisme Mahasiswa (2023)	Surya Insani Kamil dkk	Menjelaskan pentingnya pendidikan bela negara	Studi kepustakaan	Pendidikan bela negara	Pendidikan bela negara memperkuat nasionalisme mahasiswa
16	Creating National Resilience through State Defence (2023)	Wiwik Handayani dkk	Mengukur pengaruh bela negara terhadap karakter siswa	Kuantitatif kausalitas	Ketahanan nasional	Bela negara berpengaruh positif pada karakter dan ketahanan nasional
17	Strategies to Enhance Civic Awareness for State Defence (2024)	Achmad Farid Wajdi dkk	Mengembangkan State Defence Index (SDI)	Mixed method	State Defence Index	SDI efektif mengukur kesadaran bela negara masyarakat
18	The Influence of State Defense Training and Motivation (2023)	Suharno Pawirosumarto dkk	Mengukur pengaruh pelatihan bela negara terhadap kinerja ASN	Kuantitatif survei	Pelatihan ASN	Pelatihan dan motivasi meningkatkan kinerja ASN
19	Analysis of Effect of Training and Career on	Mexy Novalina dkk	Menganalisis pengaruh pelatihan dan karier ASN	Kuantitatif path analysis	Pelatihan dan karier ASN	Pelatihan dan karier berpengaruh

No	Nama Jurnal/Tahun	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode	Fokus Kajian	Hasil Penelitian
	Performance (2018)					signifikan terhadap kinerja
20	Implementation of National Defense Policy at Higher Education (2024)	Harri Dolli Hutabarat dkk	Mengkaji implementasi kebijakan bela negara di perguruan tinggi	Kualitatif studi kasus	Implementasi kebijakan bela negara	Implementasi belum optimal akibat lemahnya koordinasi

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Konsep Bela Negara dalam Perspektif Sosial dan Politik

Bela negara merupakan konsep yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketahanan nasional Indonesia. Secara regulatif, bela negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mendefinisikan bela negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam perkembangan kajian akademik, konsep bela negara tidak lagi dipahami secara sempit sebagai keterlibatan warga negara dalam aktivitas pertahanan militer. Bela negara berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hingga birokrasi. Perspektif ini muncul karena ancaman terhadap negara pada era kontemporer tidak hanya berbentuk agresi fisik, tetapi juga ancaman nonmiliter seperti radikalisme, intoleransi, disinformasi, korupsi, degradasi moral, dan menurunnya rasa kebangsaan.

Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015), nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kelima nilai tersebut menjadi fondasi dalam pembentukan karakter warga negara yang memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional.

Dalam konteks birokrasi, bela negara memperoleh makna yang lebih spesifik. ASN sebagai unsur aparatur negara tidak dituntut untuk menunjukkan bela negara dalam bentuk pertahanan fisik semata, tetapi juga mewujudkan melalui profesionalisme, integritas, loyalitas, serta pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, bela negara bagi ASN dapat dipahami sebagai manifestasi pengabdian kepada negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara bertanggung jawab. Namun demikian, pemaknaan bela negara tidak selalu bersifat tunggal. Dalam praktik sosial, individu dapat memahami konsep tersebut secara berbeda sesuai dengan pengalaman, lingkungan organisasi, dan latar belakang sosial yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bela negara bukan sekadar konsep normatif, melainkan sebagai arena sosial yang dipenuhi berbagai proses pembentukan makna.

3.2. Aparatur Sipil Negara sebagai Agen Negara

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam perspektif administrasi publik, ASN adalah instrumen utama negara dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam perspektif sosiologi politik, ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berada dalam medan relasi kekuasaan negara. Mereka menjadi penghubung antara negara dan masyarakat sekaligus menjadi media pembentukan nilai-nilai yang ingin dibangun oleh negara.

Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menuntut ASN untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Thoha (2014) menegaskan bahwa birokrasi tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, budaya organisasi, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam lingkungan institusional.

Dalam konteks bela negara, posisi ASN menjadi sangat strategis karena mereka merupakan kelompok yang secara langsung menerima proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai mekanisme formal negara. Melalui pelatihan, kebijakan, dan budaya organisasi, ASN diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai bela negara. Namun karena ASN juga merupakan individu yang memiliki pengalaman dan latar belakang sosial yang beragam, maka pemaknaan terhadap bela negara berpotensi berbeda-beda.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ASN tidak dapat diposisikan hanya sebagai obyek kebijakan negara. Sebaliknya, ASN perlu dipahami sebagai subyek aktif yang memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan, menerima, menyesuaikan, bahkan menolak makna yang diproduksi negara. Perspektif inilah yang menjadi dasar penelitian ini dalam melihat ASN sebagai aktor yang terlibat dalam proses dialektika makna bela negara.

3.3. Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann

Kerangka teoritis utama dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966). Dalam karya *The Social Construction of Reality*, keduanya menjelaskan bahwa realitas sosial tidak hadir secara alamiah, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat tiga tahapan utama dalam pembentukan realitas sosial, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ketika individu atau institusi menciptakan dan mengekspresikan gagasan ke dalam dunia sosial. Dalam konteks penelitian ini, negara melakukan eksternalisasi terhadap konsep bela negara melalui regulasi, kebijakan, pelatihan ASN, simbol-simbol nasionalisme, dan berbagai program pembinaan kebangsaan. Sedangkan tahapan Obyektivasi terjadi ketika gagasan yang diciptakan tersebut diterima secara luas dan dianggap sebagai kenyataan yang obyektif. Dalam birokrasi, konsep bela negara kemudian menjadi norma organisasi yang diwujudkan dalam berbagai aturan dan prosedur. ASN menerima konsep tersebut sebagai bagian identitas profesional mereka. Adapun tahapan Internalisasi merupakan proses ketika individu menyerap nilai-nilai yang telah diobyektivasi dan menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran subyektif. Pada tahap ini, ASN mengembangkan pemahaman pribadi mengenai arti bela negara berdasarkan pengalaman kerja, interaksi sosial, dan lingkungan organisasi yang mereka hadapi.

Teori konstruksi sosial menjadi penting karena memungkinkan penelitian ini melihat bahwa makna bela negara tidak bersifat tetap dan tunggal. Sebaliknya, makna tersebut terus dibentuk melalui interaksi antara negara sebagai institusi dengan ASN sebagai agensi.

3.4. Teori Kekuasaan dan Disiplin Michel Foucault

Selain teori konstruksi sosial, penelitian ini juga menggunakan perspektif Michel Foucault mengenai relasi kekuasaan dan disiplin. Foucault (1977; 1980) berpendapat bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik, tetapi melalui produksi pengetahuan, norma, dan diskursus yang membentuk perilaku individu.

Dalam pandangan Foucault, institusi modern seperti sekolah, rumah sakit, militer, dan birokrasi berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang menghasilkan individu-individu yang patuh terhadap norma yang berlaku. Kekuasaan bekerja secara halus melalui proses normalisasi sehingga individu sukarela menyesuaikan perilakunya dengan standar yang ditentukan institusi.

Dalam konteks penelitian ini, bela negara dapat dipahami sebagai diskursus yang diproduksi negara untuk membentuk ASN yang loyal, disiplin, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional. Pelatihan bela negara, Latsar CPNS, upacara kenegaraan, dan berbagai simbol nasionalisme merupakan bentuk teknologi kekuasaan yang digunakan untuk membangun identitas ASN ideal. Namun, Foucault juga menegaskan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ

selalu terdapat resistensi. Oleh karena itu, ASN tidak selalu menerima makna dominan bela negara secara pasif. ASN dapat melakukan interpretasi ulang, negosiasi, bahkan resistensi terhadap nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan realitas kerja mereka. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa dalam praktik birokrasi sering ditemukan perbedaan pemahaman mengenai bela negara meskipun negara telah menyediakan definisi resmi yang sama.

3.5. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang digunakan, penelitian ini memandang bahwa makna bela negara di lingkungan ASN merupakan hasil interaksi antara struktur dan agensi.

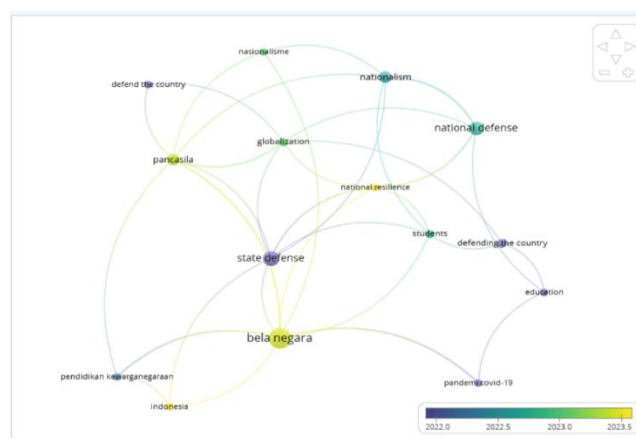
Struktur diwujudkan melalui regulasi, kebijakan, budaya organisasi, pendidikan, serta berbagai instrumen negara yang membentuk definisi resmi mengenai bela negara. Sementara itu, agensi diwujudkan melalui kemampuan ASN untuk menginterpretasikan, menerima, menegosiasikan, atau bahkan menolak makna yang diproduksi negara.

Melalui proses tersebut, terbentuk dialektika makna yang melibatkan konstruksi, obyektivasi, internalisasi, kontestasi, negosiasi, dan resistensi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan bela negara bukan sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai praktik sosial yang terus diproduksi dalam kehidupan birokrasi sehari-hari

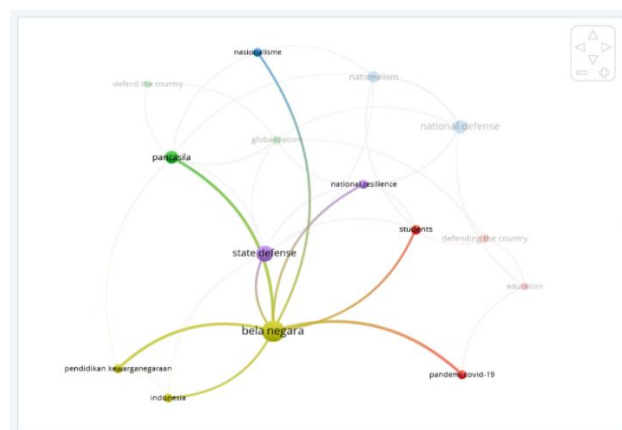
4. Hasil dan pembahasan

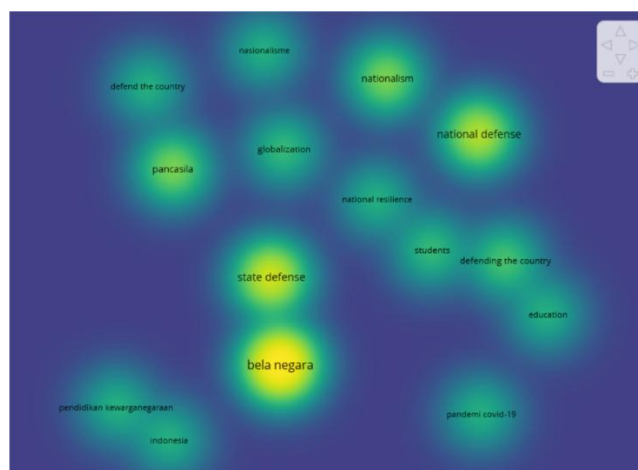
4.1. Pemetaan Literatur Bela Negara Menggunakan VOSviewer

Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi VOSviewer terhadap artikel yang diperoleh melalui Publish or Perish. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa kata kunci "bela negara" menjadi node utama yang terhubung dengan konsep nasionalisme, pertahanan nasional, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan ketahanan nasional. Namun keterhubungan kata kunci yang berkaitan dengan ASN dan pemaknaan bela negara masih relatif lemah.



Gambar 1. Hasil overlay visualitation



Gambar 2. Hasil network visualitation**Gambar 3.** Hasil density visualitation

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menghasilkan beberapa temuan penting. Sebagaimana gambar diatas, visualisasi jaringan menunjukkan bahwa kata kunci “bela negara” menjadi simpul utama yang terhubung dengan konsep nasionalisme, pertahanan nasional, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan ketahanan nasional. Namun keterhubungan langsung antara kata kunci “ASN”, “makna”, dan “dialektika” relatif lemah dibandingkan tema-tema normatif lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai bela negara masih berfokus pada pendidikan kewarganegaraan, nasionalisme, dan kebijakan pertahanan, sementara studi mengenai konstruksi makna subyektif ASN masih sangat terbatas.

Pada overlay visualization, terlihat bahwa penelitian-penelitian terbaru mulai bergeser dari isu pendidikan kewarganegaraan menuju pembahasan pertahanan nonmiliter dan ketahanan nasional. Namun tema mengenai kontestasi makna bela negara dalam birokrasi belum berkembang secara signifikan. Sementara itu, density visualization memperlihatkan bahwa kata kunci yang paling padat dan sering muncul adalah “bela negara”, “state defence”, “national defence”, dan “Pancasila”, sedangkan kata kunci yang berkaitan dengan birokrasi ASN masih berada pada area perifer.

Temuan tersebut menguatkan argumentasi bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena mengkaji aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya, yaitu dialektika makna bela negara di kalangan ASN.

Hubungan antara peta bibliometrik dan sintesis tematik perlu dibaca secara hati-hati. VOSviewer tidak secara langsung membuktikan adanya “kontestasi” atau “resistensi”, karena kedua konsep tersebut tidak muncul sebagai kluster dominan pada korpus. Namun, justru keterpisahan relatif kata “makna” dari simpul “ASN” dan dominannya kata kunci normatif menunjukkan ruang konseptual yang belum terisi. Ruang tersebut kemudian dijelaskan oleh sintesis tematik, dimana kluster praktik birokrasi memperlihatkan bagaimana nilai diterjemahkan ke dalam kerja sehari-hari, sedangkan dimensi sosial-kritis memuat apatisme, rendahnya partisipasi, ambiguitas, dan bentuk resistensi simbolik. Dengan demikian, “arena kontestasi/resistensi” dalam artikel ini bukan diklaim sebagai kluster VOSviewer tersendiri, melainkan sebagai hasil integrasi antara pola bibliometrik dan pembacaan tematik terhadap isi 20 artikel.

4.2. Sintesis Temuan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Ringkasan Matriks Sintesis Penelitian

Tema	Jumlah Artikel	Temuan Utama
Bela Negara sebagai Nilai Normatif	8	Bela negara dipahami sebagai implementasi nilai Pancasila, nasionalisme, dan kewajiban warga negara
Bela Negara sebagai Kebijakan Negara	5	Negara menginstitusionalisasikan bela negara melalui pelatihan, Komcad, dan penguatan wawasan kebangsaan

Tema	Jumlah Artikel	Temuan Utama
Bela Negara dalam Birokrasi ASN	4	ASN diposisikan sebagai agen pertahanan nonmiliter dan penjaga ideologi negara
Dinamika Kritis Bela Negara	3	Muncul gejala apatisme, resistensi simbolik, dan rendahnya partisipasi dalam program tertentu

Sintesis terhadap 20 artikel menunjukkan empat pola besar penelitian. Pertama, bela negara masih dominan dipahami sebagai konsep normatif yang berakar pada Pancasila dan nasionalisme. Kedua, negara menginstitutionalisasi bela negara melalui kebijakan, pelatihan, dan program birokrasi. Ketiga, dalam praktik birokrasi, bela negara mulai bergeser menjadi etos kerja dan budaya organisasi. Keempat, terdapat dinamika kritis berupa apatisme, resistensi simbolik, dan negosiasi makna di kalangan ASN.

4.3. Bela Negara sebagai Konstruksi Normatif-Ideologis Negara

Hasil Systematic Literature Review terhadap 20 artikel menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai bela negara masih didominasi oleh pendekatan normatif-ideologis yang menempatkan bela negara sebagai seperangkat nilai kebangsaan yang harus diinternalisasi oleh warga negara, termasuk ASN. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa bela negara umumnya dipahami sebagai manifestasi cinta tanah air, kesetiaan terhadap Pancasila, kepatuhan terhadap konstitusi, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam perspektif ini, bela negara diposisikan sebagai instrumen pembentukan karakter nasional yang berfungsi menjaga integrasi nasional di tengah berbagai tantangan globalisasi.

Penelitian Prasetyo dkk. (2021), Putria dkk. (2023), (Kristiani, 2022), dan Khodati dkk. (2023) menunjukkan bahwa bela negara secara dominan dikonstruksi sebagai kewajiban moral dan konstitusional warga negara. Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana negara berupaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya nasionalisme sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai penelitian tersebut, bela negara dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat identitas nasional, meningkatkan rasa memiliki terhadap negara, serta membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif Berger dan Luckmann (1966), kondisi tersebut menunjukkan adanya proses eksternalisasi yang dilakukan negara terhadap konsep bela negara. Negara sebagai institusi sosial memproduksi makna tertentu mengenai bela negara melalui berbagai instrumen formal seperti regulasi, pendidikan, pelatihan, kurikulum, simbol nasionalisme, dan kebijakan publik. Melalui proses eksternalisasi tersebut, negara membangun definisi resmi mengenai bela negara yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk ASN.

Makna yang diproduksi negara selanjutnya mengalami proses obyektivasi, yaitu ketika konsep bela negara diterima secara luas sebagai norma sosial yang dianggap benar dan sah. Dalam birokrasi pemerintahan, obyektivasi terlihat melalui berbagai regulasi, kode etik ASN, program pembinaan ideologi Pancasila, serta pelatihan bela negara yang menjadi bagian dari sistem pengembangan aparatur. Nilai bela negara kemudian tidak lagi dipahami sebagai gagasan abstrak, melainkan sebagai bagian dari identitas kelembagaan birokrasi.

Obyektivasi tersebut terlihat secara nyata dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Program ini dirancang untuk membentuk karakter ASN yang profesional sekaligus memiliki komitmen kebangsaan. Penelitian Adia (2022) menunjukkan bahwa pelatihan kesiapsiagaan bela negara mampu meningkatkan disiplin, loyalitas organisasi, dan kesadaran nasionalisme peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengajarkan aspek teknis birokrasi kepada ASN, tetapi juga berupaya membentuk orientasi nilai yang sesuai dengan kepentingan negara.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa proses internalisasi bela negara tidak berlangsung secara seragam. Meskipun negara berusaha membangun definisi tunggal mengenai bela negara, pengalaman sosial ASN yang beragam menyebabkan munculnya variasi pemahaman terhadap konsep tersebut. Dalam konteks ini, internalisasi tidak dapat dipahami sebagai proses penerimaan pasif terhadap nilai yang diberikan negara, melainkan sebagai proses aktif di mana ASN melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman birokrasi yang dihadapi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bela negara tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai arena produksi makna yang terus mengalami transformasi dalam kehidupan sosial birokrasi. Dengan demikian, ASN tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai obyek internalisasi nilai negara, tetapi juga sebagai subyek yang turut membentuk makna bela negara melalui praktik keseharian mereka.

4.4. Bela Negara sebagai Instrumen Disiplin dan Produksi Subyek ASN

Selain berfungsi sebagai nilai normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa bela negara juga beroperasi sebagai instrumen disiplin dalam birokrasi modern. Dalam perspektif Michel Foucault (1977; 1980), kekuasaan modern bekerja melalui produksi diskursus yang membentuk subyek-subyek yang patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku. Negara tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik sebagai instrumen utama pengendalian sosial, tetapi menggunakan berbagai mekanisme disiplin yang bekerja secara halus melalui pendidikan, pelatihan, regulasi, dan budaya organisasi.

Dalam konteks ASN, bela negara dapat dipahami sebagai salah satu bentuk diskursus yang diproduksi negara untuk membentuk aparatur yang ideal. ASN yang ideal dikonstruksi sebagai individu yang nasionalis, loyal terhadap negara, disiplin, memiliki integritas, serta mampu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Karakteristik tersebut dibentuk melalui berbagai instrumen birokrasi yang secara terus-menerus menanamkan nilai bela negara kepada aparatur.

Pelatihan dasar CPNS, pendidikan kepemimpinan, kegiatan wawasan kebangsaan, dan program Komponen Cadangan (Komcad) merupakan contoh konkret dari teknologi kekuasaan yang digunakan negara untuk membentuk subyek ASN. Melalui program-program tersebut, negara berupaya menghasilkan aparatur yang memiliki kesadaran kebangsaan sekaligus tunduk pada norma organisasi yang berlaku.

Dalam perspektif Foucault, proses tersebut merupakan bentuk normalisasi, yaitu mekanisme yang menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap ideal oleh institusi. ASN yang mampu menunjukkan loyalitas, disiplin, dan komitmen terhadap negara diposisikan sebagai aparatur yang baik, sedangkan perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai tersebut cenderung dipersepsikan negatif.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa proses normalisasi tidak selalu berjalan secara efektif. Penelitian Saputro dkk. (2024) menemukan bahwa pendekatan yang terlalu formalistik dan dogmatis dalam sosialisasi bela negara justru berpotensi menimbulkan apatisme birokrasi. ASN cenderung memandang program bela negara sebagai rutinitas administratif apabila tidak dihubungkan secara langsung dengan realitas pekerjaan mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa produksi subyek birokrasi tidak pernah berlangsung secara linear. ASN bukan sekadar penerima pasif dari diskursus negara, tetapi memiliki kapasitas untuk menilai relevansi nilai-nilai yang disampaikan. Oleh karena itu, keberhasilan internalisasi bela negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menghubungkan nilai tersebut dengan pengalaman kerja sehari-hari ASN.

4.5. Kontestasi Makna Bela Negara dalam Praktik Birokrasi

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah munculnya kontestasi makna bela negara di lingkungan ASN. Literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat pemahaman yang sepenuhnya seragam mengenai bela negara. Sebaliknya, terdapat berbagai pemahaman yang berkembang sesuai dengan posisi sosial, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta generasi ASN yang berbeda.

Variasi pemaknaan yang tampak dalam korpus terutama berkaitan dengan pengalaman, konteks organisasi, dan posisi sosial aparatur. Namun, perlu ditegaskan bahwa korpus SLR ini belum menyediakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan perbedaan yang konsisten antara ASN generasi senior dan generasi muda. Temuan generasional dalam korpus lebih banyak muncul melalui studi tentang generasi muda/mahasiswa dan tidak merupakan perbandingan langsung senior-junior ASN. Karena itu, artikel ini memperlakukan generasi sebagai dimensi potensial variasi pemaknaan, bukan sebagai temuan kausal yang sudah terbukti.

Demikian pula, perbedaan PNS dan PPPK, ASN pusat dan daerah, serta jabatan struktural dan fungsional belum diuji secara komparatif dalam 20 artikel. Meski demikian, literatur memperlihatkan variasi konteks, dalam hal ini studi tentang ASN di lingkungan pertahanan, wilayah terpencil/perbatasan, pemerintah daerah, dan birokrasi pelayanan menunjukkan bahwa konteks institusional dan tuntutan pekerjaan dapat memengaruhi cara nilai bela negara diterjemahkan ke dalam praktik. Dengan perspektif Bourdieu, perbedaan posisi dalam arena, kepemilikan modal, dan habitus dapat dipakai sebagai lensa untuk membaca mengapa makna yang sama secara normatif berpotensi diterjemahkan secara berbeda oleh aktor yang menempati posisi birokrasi berbeda.

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya kontestasi antara makna hegemonik yang diproduksi negara dengan pengalaman subyektif ASN. Negara berusaha mempertahankan definisi formal mengenai bela negara, sementara ASN terus melakukan reinterpretasi sesuai dengan konteks yang mereka hadapi.

Dalam perspektif Gramsci (1971), kondisi tersebut mencerminkan proses hegemoni dan kontra-hegemoni yang berlangsung dalam birokrasi. Hegemoni negara bekerja melalui pembentukan persetujuan sosial terhadap nilai-nilai tertentu. Namun persetujuan tersebut tidak pernah bersifat absolut karena selalu terdapat ruang bagi munculnya interpretasi alternatif. Kontestasi makna ini menjadi indikator bahwa bela negara bukanlah konsep yang statis, melainkan arena sosial yang terus mengalami perdebatan dan negosiasi dalam praktik birokrasi sehari-hari.

4.6. Resistensi terhadap Makna Dominan Bela Negara

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa resistensi terhadap makna dominan bela negara muncul dalam berbagai bentuk. Resistensi tersebut tidak selalu berupa penolakan terbuka terhadap negara, tetapi sering kali muncul secara terselubung melalui sikap apatis, ketidakpedulian, reinterpretasi, atau sekadar kepatuhan formal tanpa keterikatan emosional terhadap nilai yang diinternalisasikan.

Sebagian ASN memandang bela negara sebagai slogan administratif yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tantangan birokrasi yang mereka hadapi. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, masalah karier, dan ketimpangan organisasi sering kali dianggap lebih mendesak dibandingkan program-program internalisasi nilai kebangsaan.

Dalam perspektif Foucault, resistensi merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari relasi kekuasaan. Semakin intensif negara memproduksi diskursus tertentu, semakin besar kemungkinan munculnya bentuk-bentuk resistensi terhadap diskursus tersebut. Oleh karena itu, resistensi tidak dapat dipahami sebagai kegagalan semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang menunjukkan adanya ruang refleksi dan kritik dalam birokrasi.

Penelitian Safiri (2021) menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai bela negara dapat membuka ruang bagi munculnya ideologi alternatif di kalangan ASN. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi nilai kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formalistik, tetapi memerlukan keterlibatan emosional dan rasional aparatur.

4.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dialektika Makna Bela Negara

Sintesis literatur menunjukkan lima kondisi yang berpotensi membentuk dialektika makna, yaitu relasi kekuasaan birokrasi, pengalaman kerja dan generasi, budaya organisasi, habitus/latar belakang pendidikan, serta kebijakan institusional. Relasi kekuasaan menentukan siapa yang lebih kuat dalam menetapkan definisi dan standar perilaku, pengalaman kerja memengaruhi relevansi nilai bagi aktor, budaya organisasi menjadi medium reproduksi norma, habitus memberi kecenderungan disposisional dalam menilai negara dan pengabdian, sedangkan kebijakan institusional mengobjektivaskan makna melalui aturan, pelatihan, evaluasi, dan program. Dalam kerangka tipologi ASN, status PNS-PPPK dan jabatan struktural-fungsional penting untuk diperiksa pada studi empiris lanjutan, tetapi SLR ini belum menyediakan dasar untuk menyatakan bahwa kedua kategori tersebut menghasilkan perbedaan pemaknaan tertentu. Sebaliknya, dimensi yang paling konsisten dalam korpus adalah pengaruh konteks organisasi, pengalaman, posisi, dan cara nilai diterjemahkan ke dalam praktik kerja.

4.8. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, artikel ini mengusulkan bahwa dialektika makna bela negara dapat dipahami sebagai rangkaian yang bergerak dari konstruksi menuju obyektivasi dan internalisasi, tetapi tidak berhenti pada penerimaan nilai. Pada titik internalisasi, aktor membawa pengalaman, posisi, dan habitusnya ke dalam proses interpretasi, ketika terdapat ketidaksesuaian antara makna institusional dan pengalaman kerja, terbuka proses negosiasi, kontestasi, reinterpretasi, dan resistensi. Berger dan Luckmann menjelaskan mekanisme pembentukan realitas sosial. Foucault menerangkan bagaimana kekuasaan dan normalisasi bekerja dalam pembentukan subjek, sedangkan Gramsci membantu membaca bagaimana makna dominan memperoleh persetujuan. Disisi lain, Bourdieu memperjelas pengaruh arena, posisi, dan habitus terhadap kapasitas aktor untuk menerima atau menegosiasikan makna. Sintesis ini menjadi kontribusi konseptual artikel bagi sosiologi birokrasi: bela negara dibaca bukan hanya sebagai isi kebijakan, melainkan sebagai proses produksi dan perebutan legitimasi makna di antara struktur dan agensi.

4.9. Research Gap dan Kebaruan Penelitian

Hasil SLR menunjukkan bahwa penelitian mengenai bela negara masih didominasi pendekatan normatif, evaluatif, dan kebijakan. Fokus yang berulang adalah efektivitas pelatihan, penguatan nasionalisme, partisipasi Komponen Cadangan, pembentukan karakter, serta implementasi kebijakan. Bahkan pada studi ASN, aparatur lebih sering ditempatkan sebagai penerima program dan indikator keberhasilan dibandingkan sebagai aktor yang memproduksi makna. Temuan VOSviewer memperkuat kecenderungan tersebut: “bela negara” tampil sebagai simpul kuat yang berjejaring dengan nasionalisme, Pancasila, pertahanan nasional, dan pendidikan kewarganegaraan, sementara keterhubungan “ASN-makna-dialektika” relatif lemah. Karena itu, gap penelitian terletak bukan semata-mata pada sedikitnya studi tentang ASN, tetapi pada belum berkembangnya penjelasan mengenai mekanisme sosial yang menghubungkan definisi institusional bela negara dengan pemaknaan subyektif ASN, termasuk proses penerimaan, adaptasi, negosiasi, reinterpretasi, dan resistensi dalam praktik birokrasi.

Kebaruan artikel ini berada pada level sintesis konseptual dan metodologis. Secara konseptual, artikel menawarkan kerangka “dialektika makna” yang mengintegrasikan konstruksi, obyektivasi, internalisasi dengan kontestasi, negosiasi, dan resistensi. Secara metodologis, artikel memperlihatkan bagaimana workflow digital yaitu Publish or Perish, Mendeley, VOSviewer, dan NotebookLM dapat dipadukan untuk menghasilkan pemetaan sekaligus pembacaan interpretatif, tanpa menyerahkan penafsiran kepada perangkat lunak. Kerangka tersebut menghasilkan tiga proposisi analitis, yaitu pertama, makna dominan bela negara dibentuk dan diobjektivasi melalui regulasi, pelatihan, kebijakan, dan budaya organisasi. Kedua, internalisasi selalu dimediasi pengalaman, posisi, dan habitus aktor sehingga tidak identik dengan penerimaan pasif dan ketiga, ketika makna institusional berhadapan dengan pengalaman dan kepentingan aktor, muncul spektrum respons mulai dari penerimaan, adaptasi, negosiasi, reinterpretasi, kepatuhan formal, hingga resistensi. Kerangka inilah yang kemudian dapat menjadi pijakan bagi studi empiris ASN di Kementerian/Lembaga tertentu, khususnya dengan karakteristik pegawai yang heterogen.

5. Simpulan dan saran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika pemaknaan bela negara di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan Systematic Literature Review terhadap 20 artikel ilmiah yang relevan dengan tema bela negara, nasionalisme, birokrasi, dan kebijakan pertahanan negara. Berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bela negara di lingkungan ASN tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsep normatif yang bersifat tunggal, tetap, dan final. Sebaliknya, bela negara merupakan arena dialektika sosial yang melibatkan proses konstruksi, obyektivasi, internalisasi, negosiasi, kontestasi, dan resistensi makna yang berlangsung secara dinamis dalam kehidupan birokrasi.

Temuan pertama menunjukkan bahwa negara secara aktif mengonstruksi makna bela negara melalui berbagai kebijakan dan instrumen formal. Melalui proses tersebut, negara berupaya membangun definisi resmi mengenai bela negara yang menekankan nilai-nilai nasionalisme, loyalitas terhadap negara, disiplin, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan publik. Dalam perspektif Berger dan Luckmann (1966), kondisi tersebut mencerminkan proses eksternalisasi dan obyektivasi yang dilakukan negara dalam membentuk realitas sosial mengenai bela negara.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa bela negara tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kebangsaan, tetapi juga menjadi instrumen disiplin birokrasi. Negara menggunakan berbagai mekanisme pelatihan dan pembinaan untuk membentuk ASN yang sesuai dengan standar ideal organisasi. Dalam perspektif Foucault (1977; 1980), bela negara berfungsi sebagai diskursus yang memproduksi subyek ASN yang loyal, patuh, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Namun proses tersebut tidak berlangsung secara linear karena ASN tetap memiliki ruang untuk melakukan interpretasi terhadap nilai-nilai yang diterimanya.

Temuan ketiga menunjukkan adanya variasi pemaknaan yang berkaitan dengan pengalaman, konteks organisasi, dan posisi sosial aparatur. Namun, SLR ini belum menyediakan bukti komparatif yang cukup untuk menyatakan perbedaan yang konsisten antara ASN generasi senior dan generasi muda. Karena itu, generasi, status PNS–PPPK, posisi struktural–fungsional, serta konteks pusat–daerah diposisikan sebagai dimensi analitis yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Temuan keempat menunjukkan adanya spektrum respons terhadap makna dominan, mulai dari penerimaan dan adaptasi hingga kepatuhan formal, reinterpretasi, apatisme, dan resistensi. Temuan ini tidak berarti seluruh ASN melakukan resistensi, melainkan menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak berlangsung secara linear dan membuka ruang agensi.

Temuan kelima menunjukkan bahwa dialektika makna dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya organisasi, pengalaman kerja, generasi, latar belakang pendidikan/habitus, serta kebijakan institusional. Secara teoretis, integrasi Berger dan Luckmann, Foucault, Gramsci, dan Bourdieu menghasilkan model analitis yang memandang bela negara sebagai proses produksi dan perebutan legitimasi makna antara struktur dan agensi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa ASN tidak dapat diposisikan hanya sebagai obyek kebijakan bela negara. ASN merupakan aktor sosial yang secara aktif terlibat dalam proses produksi makna melalui pengalaman birokrasi yang mereka jalani. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bela negara perlu bergeser dari pendekatan yang bersifat normatif dan doktrinal menuju pendekatan yang lebih reflektif, dialogis, dan kontekstual.

Keterbatasan utama kajian ini adalah ukuran korpus yang relatif kecil untuk SLR umum dan ketergantungannya pada data sekunder. Dua puluh artikel memadai untuk eksplorasi kualitatif sintetis yang menjadi tujuan artikel, tetapi belum memungkinkan generalisasi tentang seluruh ASN Indonesia. Selain itu, artikel yang ada belum menyediakan perbandingan langsung PNS, PPPK, struktural–fungsional, pusat–daerah, atau senior–junior ASN secara sistematis. Karena itu, kategori tersebut lebih tepat diposisikan sebagai dimensi analitis yang perlu diuji pada studi empiris berikutnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji proses pemaknaan bela negara melalui pendekatan empiris, seperti fenomenologi, etnografi organisasi, atau studi kasus, guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara negara, birokrasi, dan aparatur terkait bela negara dalam praktik sehari-hari. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada instansi tertentu yang memiliki karakteristik kepegawaian yang heterogen (terdiri dari ASN, TNI dan Polri), seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan erat dengan isu pertahanan dan keamanan nasional.

Daftar Rujukan

Adia, V. R. (2022). *Efektivitas pelatihan materi kesiapsiagaan bela negara dalam meningkatkan rasa nasionalisme pasca Latsar CPNS di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan*

- Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian RI. Jurnal Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(2), 110–119. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i2.2244>.
- Assani, S. (2022). *Pengaruh Pancasila dan Bela Negara Dengan Kehidupan di Era Pandemi*. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 4(1): 40-45. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v4i1.5865>
- Ayu. R.O (2024). *Integrasi Nilai Pancasila Dan Sosiologi Birokrasi Sebagai Pertahanan Non-Militer Dalam Menghadapi Peperangan Asimetris Di Wilayah Terpencil Indonesia*. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, 4(2):290-317. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.316>.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Handayani, W., Sulistiyantoro, H., Dermawan, R., & Ratnawati, E. T. R. (2023). *Creating national resilience through state defence and student character at Gerakan Sekolah Belajar*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(4), 807–816. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i4.58359>
- Hidayat, F. (2022). *Urgensi kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara dalam komponen cadangan*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(1): 29-38. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217>.
- Hutabarat, H. D., Suryono, A., Khairul Muluk, M. R., & Wijaya, A. F. (2024). *Implementation of national defense policy at the higher education level in support national defense*. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(6), 201–214. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i6.2148>.
- Kamil, S. I., Nugroho, A. B., & Tarina, D. D. Y. (2023). *Pentingnya pendidikan bela negara untuk menumbuhkan nasionalisme mahasiswa Indonesia*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 926–933. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.
- Khodati, S. E., Wahyuni, T. S., & Maftuh, B. (2023). *Aktualisasi nilai Pancasila sebagai perspektif kesadaran bela negara pada generasi society 5.0*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 89–97. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.62363>
- Kristiani, R. N. (2022). *Membangun sikap bela negara dengan nilai Pancasila dalam ruang lingkup masyarakat masa kini*. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*. 2(2): 33-40. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v2i2.5839>
- Lamidi. (2023). *Implementasi penguatan bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1): 40-50. <https://doi.org/10.31629/Juan.V11i01.5946>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Nopriza, D., Simbolon, L., & Susanto. (2022). *Peran serta PNS Kemhan sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 5023–5033. <https://doi.org/10.31004/jpdv.v4i4.6273>.
- Novalina, M., Yasin, M., & Sodikin, A. (2018). *Analysis Of Effect Of Training And Career On The Performance Of Civil Service Through Motivation In Community National Defense The State (KOHANUDNAS)*. *International Journal of Research Science and Management*, 5(11), 19–23. <https://ijrsm.com/index.php/journal-ijrsm/article/view/383>.
- Pawirosumarto, S., Setyadi, A., Ariana, S., & Akbar, Y. K. (2023). *The Influence of State Defense Training and Motivation on The Performance of The Civil Apparatus in The Tni Spers*. *Dinasti*

- International Journal of Management Science*, 4(5), 932–945.
<https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1841>
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). *Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara*. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 1(1):1-7.
<https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382>.
- Purwati, R., Almubaroq, H. Z., & Saptono, E. (2022). *Kepemimpinan Strategis Kepala Daerah dalam Aktualisasi Bela Negara Masyarakat di Jawa Barat*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3035074>.
- Putria, M. F. J. L., Rahman, A., Rahmawati, E., Ningsih, I. F., & Hidayat, W. (2024). *Bela negara sebagai implementasi nilai Pancasila bagi generasi muda*. *Innovations in Multidisciplinary Education Journal*, 1(1), 15-21. <https://doi.org/10.61476/rw71pm13>.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169). Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141). Sekretariat Negara.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safiri, R. B. . (2021). *Menangkal Gerakan Radikalisme Di Kalangan ASN Melalui Pemahaman Nilai-Nilai Bela Negara (Determining The Movement Of Radicalism In ASN Through Understanding The Values Of State Martial)*. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 1(2), 81–87.
<https://doi.org/10.51878/social.v1i2.465>.
- Saputro, S. H., Sarjito, A., & Duarte, E. P. (2025). *Merevitalisasi Spirit Pengabdian: Strategi Komunikasi Bela Negara bagi Aparatur Sipil Negara di Tengah Apatisme Birokrasi*. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 321–332.
<https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8155>.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Wadjdi, A. F., Sunarto, G. E., Sianturi, E. M. T., Kurniawan, R. D., Wardhani, S. S. W., Ba'abdullah, F., Arief, M., Wibowo, M., Gunawan, M., Pragesjvara, V., Septiadi, A., Anbiya, D. R., Ramadhan, I., & Riza, H. (2024). *Strategies to enhance civic awareness for state defence in Indonesia: Measurement and benchmarking of the State Defence Index (SDI)*. *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 2024, 8(11), 8475. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.8475>.
- Wahyu, P. N., Felani, H., Soebagijo, N. H., Al-Mubaroq, H. Z., & Marnani, C. S (2022). *Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Komponen Cadangan Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(1):63-71. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2574>.